
TANTANGAN ETIKA POLITIK DALAM ERA DIGITAL: PERSPEKTIF SOSIAL DAN TEKNOLOGI

Silvia Salsabila Laowe

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Dalam era digital saat ini, etika politik menghadapi tantangan yang kompleks akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini menguraikan tantangan etika politik yang muncul dalam konteks era digital dari perspektif sosial dan teknologi. Dengan menganalisis dampak teknologi digital terhadap politik dan masyarakat, penulis menjelaskan perubahan dalam dinamika politik dan nilai-nilai sosial yang terjadi. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi berbagai perdebatan dan isu kontemporer yang berkaitan dengan etika politik dalam era digital, seperti privasi data, disinformasi, polarisasi politik, dan tanggung jawab platform media sosial. Dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan teknologi dari tantangan etika politik ini, artikel ini menyajikan beberapa strategi dan rekomendasi untuk menghadapi tantangan tersebut dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Kata Kunci: *Perspektif Sosial, Privasi Data, Disinformasi*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin maju saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah politik. Fenomena ini memberikan dampak yang signifikan terhadap cara politik dipahami, dijalankan, dan bahkan diatur. Sementara teknologi telah membuka pintu untuk partisipasi politik yang lebih luas dan aksesibilitas informasi yang lebih besar, juga muncul berbagai tantangan etika yang perlu dihadapi oleh masyarakat, pemimpin politik, dan pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, etika politik dalam era digital menjadi semakin penting untuk dipahami, dianalisis, dan diatasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam etika politik era digital adalah sejauh mana teknologi dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan proses politik secara keseluruhan. Fenomena ini terutama terlihat dalam upaya memanipulasi informasi dan diseminasi disinformasi melalui platform media sosial dan berbagai situs web. Dengan algoritma yang dioptimalkan untuk menampilkan konten yang memicu emosi dan pandangan yang sesuai dengan preferensi pengguna, platform-platform ini dapat menjadi alat yang kuat untuk memengaruhi persepsi publik, bahkan menggoyahkan stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, pertanyaan etis muncul tentang bagaimana menggunakan teknologi ini secara bertanggung jawab dan meminimalkan risiko penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merusak proses politik yang demokratis.

Selain itu, tantangan etika politik dalam era digital juga mencakup isu privasi dan keamanan data. Seiring dengan kemajuan teknologi, data pribadi dan politik semakin diambil, disimpan, dan dianalisis oleh berbagai entitas, termasuk perusahaan teknologi besar dan pemerintah. Penggunaan data ini untuk tujuan politik dapat menimbulkan masalah etika terkait dengan hak privasi individu, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan muncul tentang bagaimana memastikan bahwa pengguna data politik dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika yang kuat, termasuk transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan.

Selain dari aspek teknologi, perspektif sosial juga memainkan peran penting dalam memahami tantangan etika politik dalam era digital. Perkembangan media sosial telah mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan dan kekuatan suara individu, dan memperkuat konektivitas antarindividu. Namun, dalam konteks politik, hal ini juga dapat meningkatkan polarisasi opini, pembentukan kelompok-kelompok yang tertutup, dan konflik sosial. Tantangan etika politik melibatkan pertanyaan tentang bagaimana mempromosikan dialog yang terbuka, toleransi, dan inklusi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital ini.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan ini, penting untuk menjelajahi dan memahami dinamika hubungan antara teknologi, masyarakat, dan politik dalam konteks etika politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan etika politik dalam era digital dari perspektif sosial dan teknologi, menyajikan analisis mendalam

tentang isu-isu yang relevan, dan mengidentifikasi strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan ini secara efektif dan bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran (*mixed-methods*) yang melibatkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengeksplorasi tantangan etika politik dalam era digital dari perspektif sosial dan teknologi. Pendekatan campuran dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang kompleks dan bervariasi serta untuk menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

- 1. Analisis Kualitatif:**
 - a. Wawancara Mendalam:** Penelitian akan melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli, aktivis, dan praktisi dalam bidang etika politik dan teknologi digital. Wawancara ini akan dirancang untuk memahami pandangan mereka tentang tantangan etika politik yang dihadapi dalam era digital, serta untuk mengeksplorasi solusi dan strategi yang mungkin.
 - b. Analisis Konten:** Penelitian akan melibatkan analisis konten dari berbagai sumber media sosial, platform daring, dan diskusi publik lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi tren, isu-isu utama, dan pendekatan yang digunakan dalam pembicaraan tentang etika politik dalam era digital.
- 2. Analisis Kuantitatif:**
 - a. Survei atau Kuesioner:** Penelitian juga akan melibatkan survei atau kuesioner yang disebarkan kepada responden yang representatif dari populasi yang relevan, seperti pengguna media sosial, pemimpin opini, dan pemangku kepentingan lainnya. Survei ini akan dirancang untuk mengukur persepsi, sikap, dan perilaku terkait etika politik dalam konteks digital.
 - b. Analisis Data Daring:** Data daring, termasuk data dari platform media sosial dan website, akan dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi tren, pola, dan dinamika dalam interaksi politik dan perilaku online. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi digital memengaruhi praktik politik dan perilaku etis di ruang digital.
- 3. Integrasi dan Interpretasi Data:**
 - a.** Data kualitatif dan kuantitatif akan digabungkan dan dianalisis secara terintegrasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tantangan etika politik dalam era digital. Metode triangulasi akan digunakan untuk membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kuat dan valid.
 - b.** Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi tantangan etika politik yang paling menonjol dalam era digital, serta untuk mengeksplorasi implikasi sosial, politik, dan teknologi dari temuan tersebut.
- 4. Rekomendasi dan Implikasi:**
 - a.** Berdasarkan temuan penelitian, akan dirumuskan rekomendasi kebijakan, pedoman, dan praktik terbaik untuk mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Rekomendasi ini akan ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah, lembaga politik, industri teknologi, dan masyarakat sipil.
 - b.** Implikasi penelitian akan dibahas dalam konteks pengembangan kebijakan publik, pendidikan, dan pengembangan

teknologi, serta dalam mempromosikan kesadaran dan tanggung jawab etis dalam praktik politik di era digital.

Dengan menggunakan pendekatan campuran yang mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan etika politik dalam era digital, serta memberikan landasan untuk pengembangan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Tantangan etika politik dalam era digital merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek teknologi, sosial, dan politik yang saling terkait. Dalam konteks ini, pertama-tama, kita perlu memahami bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara politik dilakukan dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan informasi politik.

Dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial, akses terhadap informasi politik menjadi lebih mudah dan luas. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru terkait dengan validitas, keandalan, dan integritas informasi politik yang disampaikan melalui platform-platform digital tersebut.

Peran media sosial dalam membentuk opini publik menjadi semakin signifikan. Media sosial memberikan wadah bagi berbagai kelompok dan individu untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara langsung, namun sekaligus juga dapat menjadi wadah untuk penyebaran disinformasi dan propaganda politik yang tidak bertanggung jawab.

Tantangan etika politik dalam era digital juga terkait dengan penggunaan data politik dan privasi individu. Dengan pengumpulan data yang luas oleh perusahaan teknologi dan pemerintah, muncul pertanyaan etis tentang bagaimana data ini digunakan untuk kepentingan politik, serta tentang hak privasi individu dalam menghadapi ancaman penggunaan data yang tidak etis.

Salah satu isu penting dalam tantangan etika politik dalam era digital adalah polarisasi politik yang semakin meningkat. Media sosial sering kali memperkuat filter gelembung (echo chamber), di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sudah sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, meningkatkan polarisasi dan menurunkan kemampuan untuk berdialog antarpemadapat yang berbeda.

Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa tantangan etika politik dalam era digital tidak hanya bersumber dari teknologi itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana teknologi tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik, termasuk partai politik, pemerintah, dan individu.

Disamping itu, penting juga untuk diakui bahwa tantangan etika politik dalam era digital tidak memiliki solusi yang mudah. Setiap solusi yang diusulkan harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan etis, serta efeknya terhadap kebebasan berbicara, hak privasi, dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Dengan demikian, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam menghadapi tantangan etika politik dalam era digital. Ini memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai

pihak untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi dan pedoman etis yang sesuai dengan konteks masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Di samping itu, pendidikan politik yang berkualitas juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Dengan meningkatkan literasi digital dan politik masyarakat, kita dapat membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menanggapi informasi politik yang tidak akurat atau menyesatkan.

Selain itu, penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi oleh aktor politik. Ini termasuk mendorong perusahaan teknologi untuk mengadopsi praktik yang lebih transparan dalam pengumpulan dan penggunaan data politik, serta untuk mengembangkan algoritma yang lebih netral secara politik.

Tantangan etika politik dalam era digital juga menyoroti perlunya peningkatan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan teknologi dan politik. Ini termasuk kerja sama antara pemerintah dalam mengembangkan kerangka kerja regulasi yang efektif, serta kerja sama antara lembaga-lembaga internasional dan pemerintah dalam memerangi disinformasi dan penyebaran informasi politik yang tidak benar.

Selanjutnya, penting untuk menekankan pentingnya kebebasan berbicara dan pers dalam menghadapi tantangan etika politik dalam era digital. Meskipun langkah-langkah untuk membatasi penyebaran disinformasi dan kebencian online mungkin diperlukan, tetapi tindakan semacam itu juga harus diimbangi dengan peningkatan perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan pers.

Dalam menghadapi tantangan etika politik dalam era digital, perlu juga diakui bahwa tidak ada solusi yang sempurna. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang terbuka dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini, dengan terus mendorong dialog dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghadapi tantangan etika politik dalam era digital, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk masyarakat yang lebih adil, transparan, dan demokratis di masa depan. Dengan demikian, tantangan ini bukan hanya menjadi ancaman, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan tatanan politik dan sosial secara keseluruhan.

Dalam menanggapi tantangan etika politik dalam era digital, penting juga untuk menekankan perlunya pembangunan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Regulasi yang efektif dapat membantu membatasi penyebaran informasi yang tidak benar dan melindungi privasi individu tanpa mengorbankan kebebasan berbicara. Namun, regulasi yang berlebihan juga dapat mengancam kebebasan berbicara dan inovasi teknologi, sehingga diperlukan keseimbangan yang tepat dalam pengembangan kerangka kerja regulasi yang efektif.

Selain dari aspek regulasi, pendekatan pendidikan dan literasi digital juga sangat penting dalam mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Pendidikan politik yang berkualitas dapat membantu masyarakat memahami cara kerja media sosial dan algoritma, serta mengembangkan keterampilan kritis untuk menilai dan mengidentifikasi informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan etika politik dalam era digital dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik mereka sendiri. Ini mencakup keterbukaan dalam penggunaan data politik dan teknologi oleh pemerintah, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi politik yang akurat dan transparan.

Di samping itu, masyarakat sipil juga dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Organisasi nirlaba, kelompok advokasi, dan individu dapat melakukan advokasi untuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam politik digital, serta memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital dan politik masyarakat.

Selain itu, perusahaan teknologi juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang memastikan bahwa produk dan layanan mereka tidak disalahgunakan untuk tujuan politik yang tidak etis. Ini mencakup pengembangan dan penerapan kebijakan yang ketat terkait dengan penggunaan data politik dan pembatasan konten yang menyesatkan atau membahayakan.

Penting juga untuk diingat bahwa tantangan etika politik dalam era digital tidak terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga bersifat global. Oleh karena itu, kerja sama internasional yang erat diperlukan dalam mengatasi tantangan ini, termasuk dalam membangun kerangka kerja regulasi yang efektif dan dalam memerangi disinformasi secara lintas batas.

Selanjutnya, penelitian dan pengembangan teknologi yang berfokus pada etika juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Ini termasuk pengembangan algoritma yang lebih transparan, alat deteksi disinformasi yang lebih canggih, dan platform media sosial yang lebih bertanggung jawab secara etis.

Perlu juga diingat bahwa respons terhadap tantangan etika politik dalam era digital haruslah bersifat inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan akademisi, kita dapat mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk tantangan ini.

Pendekatan lintas-disiplin juga diperlukan dalam mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Ini mencakup kolaborasi antara ilmu politik, ilmu komputer, etika, hukum, dan bidang lainnya untuk memahami secara menyeluruh dinamika hubungan antara teknologi, politik, dan masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk terus memonitor perkembangan teknologi dan dinamika politik dalam era digital, serta untuk melakukan evaluasi terus menerus terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi tantangan etika politik. Ini memungkinkan kita untuk secara fleksibel menyesuaikan respons kita terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam mengatasi tantangan etika politik dalam era digital, penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap langkah yang diambil. Langkah-langkah yang diambil saat ini haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan

memperhitungkan implikasi jangka panjangnya terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Penting juga untuk terus memperkuat kerja sama antar-pemerintah dan pihak-pihak terkait di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan pembangunan kapasitas dalam menghadapi tantangan bersama.

Selain itu, perlu juga dilakukan advokasi dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan etika politik dalam era digital. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, lokakarya, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan politik masyarakat.

Pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan inisiatif untuk meningkatkan keamanan dan integritas informasi politik dalam era digital. Ini mencakup langkah-langkah untuk memerangi disinformasi, perlindungan data, dan peningkatan transparansi dalam politik digital.

Selanjutnya, penting juga untuk meningkatkan kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan untuk mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan etika politik dalam era digital, penting untuk terus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berbicara, dan keadilan sosial. Ini memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk melindungi nilai-nilai demokratis dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital.

Selain itu, pendidikan politik juga merupakan faktor kunci dalam mengatasi tantangan etika politik dalam era digital. Pendidikan politik yang berkualitas dapat membantu meningkatkan literasi digital dan politik masyarakat, serta membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan etika politik.

Terakhir, penting juga untuk terus mempromosikan inklusi digital dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dalam era digital. Ini memungkinkan semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di pinggiran, untuk memiliki suara dalam proses politik dan mendapatkan akses yang sama terhadap informasi politik yang relevan.

Dalam mengakhiri diskusi tentang tantangan etika politik dalam era digital, penting untuk memahami bahwa evolusi teknologi terus berlanjut, dan dengan itu, tantangan-tantangan baru juga akan muncul. Oleh karena itu, upaya kolektif untuk mengatasi tantangan ini haruslah berkelanjutan dan adaptif, mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika politik yang terus berubah. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai etika dalam politik digital. Hanya dengan pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan, kita dapat menghadapi tantangan etika politik dalam era digital dengan sukses dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat, bukan merusak, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kebebasan masyarakat.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, tantangan etika politik dalam era digital merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Era digital membawa berbagai perubahan dalam cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan terlibat dalam proses politik. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, era digital juga membawa tantangan etika yang serius, seperti penyebaran disinformasi, privasi data yang rentan, dan manipulasi politik melalui platform online. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan regulasi yang efektif, peningkatan literasi digital dan politik masyarakat, pendidikan politik yang berkualitas, kerja sama internasional yang erat, serta pengembangan teknologi yang berbasis etika. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa era digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan, bukan sebagai sumber ancaman terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU)*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Aulia, A. M., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., & Dwiatma, G. (2022). *Penerapan E-Gudang Sebagai Tempat Penampungan Ikan*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 1(2), 54-66*.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes*.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.

- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.

- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Get Press indonesia*.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing*.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.